

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan. 2009. *Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan*, (Online), (<http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/ok-pbb/1082-pendaerahan-pbb>), diakses 18 Oktober 2012).
- Dewi, Yulitasari Mila. 2011. *Analisa Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pengalihan Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program Magister fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Diana, Anastasya. dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penentuan Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Farida, Ai Siti. 2011. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah: Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2012*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan: Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Andi.
- Mediaty dkk. 2012. *Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Nuryanti, Dewi. 2012. *Pengertian Data Kualitatif dan Kuantitatif*, (Online), (<http://www.dewinuryanti.com/2012/12/data-kualitatif-pengertian-data-kualitatif-kuantitatif.html>), diakses 27 Januari 2013).
- Peraturan Kota Makassar Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Kota Makassar*. 2009. Makassar: Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- Rangkasa, Edgar. dan Zainuddin. 2012. *Defenisi dan prinsip Otonomi Daerah*, (Online), (<http://www.phylopop.com/2012/05/definisi-dan-prinsip-otonomi-daerah.html>), diakses 22 November 2012).

- Ronalyw. 2013. Optimalkan Potensi PBB di Tahun Pertama, (Online), (<http://m.beritakotamakassar.com/index.php/wawancara/2526optimalkan-potensi-pbb-di-tahun-pertama.html>), diakses 30 Januari 2013)
- Sekaran, Uma. 2010. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba empat.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah: 1*.
- Supriyanto, Heru. 2012. *Peluang dan Tantangan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB*, (Online), (<http://www.formasi.com/index.php?page=showartikel&iid=9>), diakses 13 Desember 2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. 1985. Jakarta: Menteri Negara Sekertaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. 1999. Jakarta: Menteri Negara Sekertaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2007. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Sekertaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI tentang Perpajakan*. Bandung: Citra Umbara.
- Wahyuni, Dian. 2010. *Persiapan Pemerintah Menghadapi Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus jabodetabek)*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.